

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan menuju Indonesia merdeka penuh dengan perjuangan, pergerakan dan revolusi yang diwarnai kekhawatiran konflik internal seperti tercermin dalam beberapa friksi antartokoh-tokoh yang berkisar pada taktik yang harus diikuti dalam perjuangan melawan Belanda. Namun sampai batas tertentu isu kemerdekaan Indonesia untuk sementara mampu membentuk kohesi antarberbagai golongan dan tokoh-tokoh perintis cita-cita Indonesia merdeka tersebut.<sup>1</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.

Banyak tokoh yang berperan penting dalam terciptanya kemerdekaan tersebut sehingga melahirkan sebuah perjalanan baru bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Mohammad Natsir dengan partai Masyumi yang didirikan atas keinginan Jepang dengan membubarkan MIAI pada bulan Oktober 1943 yang mempunyai cabang-cabang di setiap keresidenan di Jawa.<sup>2</sup> Pembentukan Masyumi (November 1945) tampak hangat dan sambutan yang diberikan oleh umumnya rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Dengan

---

<sup>1</sup> J.Eliseo Rocamora, dikutip oleh Waluyo dalam bukunya *Dari Pemerontak menjadi Pahlawan Nasional*, hal. 2

<sup>2</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia*, Gadjah Mada University:2011, hal. 309

melepaskan semua perbedaan baik yang bersifat pribadi maupun ideologi, seakan tiap orang berusaha memberi bantuan kepada kemerdekaan.<sup>3</sup>

Perjuangan Mohammad Natsir tidak berhenti sampai kemerdekaan Indonesia. Mohammad Natsir salah seorang tokoh yang perjuangannya sering menjadi sasaran pandangan yang berbeda-beda, bertitik tolak dari permasalahan negara Islam atau negara Indonesia yang berdasarkan Islam, mendesak dikemukakan bahwa Islam memang senantiasa mendasari cita-cita perjuangan Natsir. Pada tahun 1930-an sampai awal 1940-an telah terjadi polemik yang menarik dan berbobot antara Natsir dan Soekarno, dua tokoh yang sangat kontras tetapi berimbang secara intelektual. Permasalah pokok dari polemik tersebut adalah Islam dan Nasionalisme.<sup>4</sup> Pemikiran keduanya saling menjadi-jadi terlihat dari karya Soekarno yang berjudul *Islam Sontoloyo*, Soekarno menyebutkan bahwa di zaman nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memaksa sabun dan kreolin<sup>5</sup> dan gagasan itu dibantah lagi oleh Mohammad Natsir dalam artikel *Islam dan Akal Merdeka* yang mengkritik pemahaman Islam dari kacamata Soekarno dengan mengatakan

“umpamanya lagi, sekarang dengan mikroskop kita suda bisa dapat tahu bahwa pada kidah anjing itu ada terdapat mikrob-mikrob yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Baik ! akan tetapi semata-mata ini saja belum bisa memberi kita hak untuk membuang cara mencuci yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itu. Demikian juga bila ada orang yang bisa

---

<sup>3</sup> Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung: Mizan, 1987, hal 47

<sup>4</sup> Waluyo, *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional*, Yogyakarta: Ombak, 2009, hal 8

<sup>5</sup> Soekarno, *Masyarakat Onta dan Masyarakat Kapal Udara*, dalam *Islam Sontoloyo*, Bandung: Sega Arsy, 2015, hal. 176-186

melihat bahwa dalam sholat itu ada semacam gerak-badan (*Sport*). Dan kita sekarang sudah mendapat cara *sport* yang modern dan praktis. Kita boleh kerjakan *sport* itu, tapi apakah bisa salat itu lantas diganti saja dengan *badminton*, umpamanya?”<sup>6</sup>

Pemikiran yang terlihat melalui kaca mata masing-masing dan perspektif berbeda terhadap Islam itu sendiri. Satu sama lain saling membenarkan argumen dan seolah-olah menghakimi salah satu sama lain. Seolah-olah menolak terhadap faham keislaman.

Penolakan terhadap Islam terus terjadi, bahkan ada yang sempat juga mengatakan bahwa Islam agama impor. Mungkin saking geramnya ingin menghabisi Islam. Pokoknya segala hal ditempuh. Tak heran bila Natsir pun tak mendapat tempat dalam sejarah Indonesia. Padahal kita semua tahu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno seperti ditulis M. Hatta dalam *Demokrasi Kita* – adalah inskonstitusional. Tapi karena Soekarno yang menang, maka menjadi sah.<sup>7</sup>

Perjuangan Natsir yang kemudian aktif di partai Masyumi, pada 1946, dalam kabinet Syahrir, diangkat sebagai Menteri Penerangan. Natsir dapat bertahan dalam jabatannya ini selama tiga kabinet hingga 1949. Satu hal yang perlu dicatat, ada April 1950, Natsir berjasa menyelamatkan republik ini dengan mosi integralnya yang terkenal. Mosi ini berhasil menyatukan kembali Indonesia yang terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian ke dalam republik. Seperti diketahui, baru beberapa tahun Indonesia merdeka, Belanda ingin menjajah

---

<sup>6</sup> Mohammad Natsir, *Islam dan Akal Merdeka*, Sega Arsy:2015, hal. 156

<sup>7</sup> Eman Mulyaatman, dalam Majalah Sabili edisi khusus 100 Tahun M. Natsir, 2008

kembali. Mereka melakukan agresi militer pertama pada 1947 dan kedua pada 1948. Akhirnya, untuk menghentikan pertikaian kedua negara ini, Belanda berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara federasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Dengan demikian, Belanda lebih mudah melakukan politik *divide et impera*-nya.<sup>8</sup> Pembentukan negara kesatuan, kata Natsir, hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik antara negara-negara bagian itu maupun antara golongan masyarakat kita pada umumnya. Usul Natsir ini, yang terkenal dengan nama “mosi integral”.<sup>9</sup> Keberhasilan ini sekaligus menaikkan pamor Natsir dan mengantarkannya ke puncak jabatan, perdana menteri.

Dalam hubungan bentuk negara, penyelesaiannya rupanya tidak sesulit yang disangka semula. Dan mosi integral dari Natsir tadi memang telah memudahkan jalan bagi pembentukan negara kesatuan. Tetapi masalah ini timbul lagi pada sidang-sidang Konstituante di Bandung yang dibentuk tahun 1956. Konstituante itu sendiri, yang dibentuk berdasar hasil Pemilihan Umum tahun 1955.<sup>10</sup> Pemilu 1955 menghasilkan empat partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Dari komposisi ini terlihat tiga kekuatan politik Indonesia, yaitu nasionalis-sekuler, Islam, dan Marxisme/Sosialisme. Ketiga aliran dasar itu muncul ke permukaan dalam berbagai kelompok dan organisasi politik, dan mereka mengikuti pemilihan umum dengan penuh semangat dalam suasana

---

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Kencana: Jakarta, 2010, hal. 220

<sup>9</sup> Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Grafiti hal. 279

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 281

bebas demokratis.<sup>11</sup> Langkah selanjutnya dari faham-faham tersebut dikeluarkan segenap kemampuannya berdasarkan ideologi masing-masing pada Sidang Konstituante 1956-1959.

Menjelang periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965), sejarah Indonesia modern memasuki periode transisi setelah gagalnya demokrasi parlementer. Selama masa transisi ini, kekuatan-kekuatan politik Indonesia memindahkan “medan tempurnya” dari politik praktis kepada perjuangan ideologi tentang dasar negara dalam Majelis Konstituante Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam sidang tersebut para wakil atau pemuka bangsa yang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia benar-benar memperjuangkan aspirasi untuk mewujudkan konstitusi yang demokratis. Mereka berjuang untuk pengakuan dan jaminan bagi hak-hak asasi warga negara serta batas-batas kewenangan pemerintah dan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan itu kepada rakyat.<sup>13</sup>

Dewan Konstituante yang merupakan hasil dari Pemilu 1955 bertugas menyusun dasar negara sebagai pengganti UUDS 1950 yang bersifat sementara. Namun karena tidak ada partai pemenang mutlak, maka perdebatan antara ketiga arus utama kekuatan politik tersebut (pen. Nasionalis-sekuler, Islam dan Marxisme/Sosialisme) –yang kemudian hanya diwakili oleh Islam dan Pancasila– menghangat di lembaga Konstituante yang bersidang pada 1956-1958, dalam

---

<sup>11</sup>Syaifi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, LP3S:Jakarta, 1996, hal. 123

<sup>12</sup>Ibid, hal. 125

<sup>13</sup>Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti:1995, hal.xx

perdebatan ini, Natsir adalah ujung tombak bagi kelompok Islam<sup>14</sup> Sebab inilah yang menjadikan penulis untuk meneliti peristiwa tersebut dan tokohnya dengan judul rencana penelitian ***“Peran Mohammad Natsir Dalam Mengusung Nilai-Nilai Islam Pada Sidang Konstituante Tahun 1956-1959”***. Penulis mempunyai alasan kenapa mengambil rencana penelitian dalam kurun waktu tersebut dan mengambil Mohammad Natsir sebagai objek kajiannya. Pertama, tahun tersebut merupakan tahun yang sangat menentukan arah politik Islam dan dasar negara Indonesia yang mempunyai penduduk yang heterogen. Kedua, Mohammad Natsir adalah seorang tokoh intelektual, ulama dan mempunyai gagasan yang cemerlang terkait dasar negara. Hingga melawan balik tentang dasar negara yang dicanangkan oleh para sekularis. Pada akhirnya mereka tidak ada satu ide pun yang masuk menjadi dasar negara Indonesia dan kelompok Islam (partai Islam) dalam perdebatan mencari dasar negara Republik Indonesia disebut sebagai kekalahan Islam.

Alasan utama untuk melakukan penelitian ini adalah karena belum adanya studi yang lebih fokus tentang peran M. Natsir dalam Konstituante. Karena itu apa yang disajikan dalam penelitian ini menjadi penambah hasanah ilmu kesejarahan khususnya, lebih mengenal tokoh-tokoh yang terkait dengan dunia politik maupun agama seperti M. Natsir.

Penulis membatasi penelitian tentang sidang Konstituante ini, mengingat begitu banyak risalah sidang pleno yang hampir 10.000 halaman jumlahnya.

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Kencana: Jakarta, 2010, hal. 224

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan dan meneliti sidang ini berdasarkan tahun, bukan berdasarkan sidang. Hal tersebut dilakukan sebab dokumen peristiwa yang terjadi pada kurun waktu 1956-1959 ketika sidang berlangsung tidak semuanya penulis dapatkan di Arsip Nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas terkait rencana penelitian, dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam rencana penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana biografi Mohammad Natsir ?
2. Bagaimana perjuangan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik dan keagamaan ?
3. Bagaimana peran Mohammad Natsir dalam mengusung nilai-nilai Islam pada Sidang Konstituante tahun 1956-1959 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pemaparan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, melahirkan sebuah tujuan dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Mengetahui biografi Mohammad Natsir.
2. Mengetahui perjuangan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik dan Keagamaan.
3. Mengetahui peran Mohammad Natsir dalam mengusung nilai-nilai Islam pada Sidang Konstituante tahun 1956-1959.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa buku yang ada kaitannya dengan Mohammad Natsir dan Sidang Konstituante 1956-1959. Buku-buku tersebut yaitu :

1. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Buku ini merupakan sebuah disertasi yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution menggunakan bahasa Inggris dengan judul asli *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Sosial-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Utrecht: Rijksuniversiteit, 1992), diterjemahkan ke dalam Indonesia dan diterbitkan oleh PT Pustaka Utama Grafiti tahun 1995.

Isi buku tersebut adalah untuk memahami pekerjaan Konstituante, yang sebelumnya belum banyak memperoleh perhatian dalam ilmu pengetahuan, saya (Adnan) meneliti seluruh risalah sidang-sidangnya dari tanggal 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959.<sup>15</sup>

Buku tersebut menerangkan tentang pergolakan dan perdebatan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui partai-partai dan anggota sidang yang telah dipilih saat Pemilu 1955, yang terjadi saat Sidang Konstituante. Sehingga Soekarno tanggal 22 April berpidato yang

---

<sup>15</sup>Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, hal. xx



mendesak supaya Konstituante menerima UUD 1945 tanpa amandemen sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Objek kajian buku ini menurut Adnan adalah studi tentang Konstituante Indonesia, yang dalam penulisan sejarah Indonesia modern diabaikan atau diremehkan, bahkan dianggap suatu kegagalan. Sebaliknya Adnan memandang Konstituante sebagai puncak dari perjuangan menuju demokrasi konstitusional di Indonesia. Tonggak-tonggak pendahulunya adalah 17 Agustus 1945 dan Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 serta tindakan-tindakan pelaksanaannya.<sup>17</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution dengan penelitian ini adalah meneliti tentang Sidang Konstituante yang terjadi 1956-1959 yang saat itu menjadi arena bertarung para tokoh agama dan nasional untuk membentuk sebuah negara.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Adnan Buyung Nasution dengan penelitian ini adalah jika Adnan Buyung Nasution meneliti proses persidangan dari dua tema Dasar Negara dan HAM, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tertuju pada satu tokoh yang ikut terlibat dalam Sidang Konstituante 1956-1959 yaitu Mohammad Natsir seorang negarawan dan politikus yang mengajukan Mosi Integral tahun 1950<sup>18</sup>. Penelitian dari penulisan biografi, pemikiran, perjuangan dan karya-

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 319

<sup>17</sup> Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, hal. xxix

<sup>18</sup> M. Dzulkifridin, 2010, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, hal. 67

karyanya, lalu yang paling ditekankan peran Mohammad Natsir dalam sidang tersebut seperti apa, dan bagaimana.

2. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, buku ini merupakan disertasi yang ditulis oleh Ahmad Syafii Ma'arif yang diterbitkan pertama kali pada Februari 1985 oleh LP3S Indonesia. Isi buku ini membahas tentang perdebatan dalam konstituante, tetapi Ahmad mengawali pembahasan dalam buku ini dengan memberikan pengantar terhadap keadaan Islam sebelum konstituante tepatnya abad ke-20 dari segi partai-partai Islam sampai teori-teori tentang Negara Islam. Studi ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan secara organik dan logis. Bab 1 adalah pendahuluan. Sebelum memasuki tema pokok pembicaraan, suatu pengertian singkat dan tepat tentang al-Quran dan nabi yang bertalian dengan topik diskusi, menjadi sangat penting. Selain itu juga harus dipertimbangkan secara hati-hati teori-teori politik yang dirumuskan oleh para yuris Muslim abad pertengahan dan oleh sarjana-sarjana serta pemikir-pemikir Muslim modern. Ini semua didiskusikan dalam Bab 2. Bab 3 bertitik berat pada mendekati Islam Indonesia di abad ke-20, yang tidak saja berdifat deskriptif-historis, tapi juga analitis-evaluatif. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan suatu latar belakang sejarah yang komprehensif terhadap topik yang dibicarakan. Perhatian lebih diberikan pada penyajian Islam sebagai suatu kekuatan pembebas (*a liberating force*) berhadapan dengan kekuatan asing mana pun yang datang ke Indonesia. Dalam Bab 4 diuraikan secara kritis masalah yang sangat

krusial, yaitu pengajuan Islam sebagai dasar falsafah negara oleh partai-partai Islam dan tantangan kelompok nasionalis dan sosialis dalam sidang-sidang Majelis Konstituante Republik Indonesia. perbenturan ideologi antara kedua kekuatan politik itu sangat mewarnai iklim demokrasi Indonesia pada bagian terakhir tahun 1950-an, sedangkan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Prospek dan kemungkinan-kemungkinan hari depan Islam di Indonesia juga dimasukkan dalam Bab 4. Bab 5 merupakan kesimpulan dari studi ini.<sup>19</sup>

Persamaan buku dengan penelitian penulis adalah membahas terkait studi tentang konstituante, namun ada perbedaannya jika didalam buku tersebut terdapat teori-teori tentang Negara Islam, dalam penelitian penulis hal tersebut tidak dibahas tetapi fokus pada kajian M. Natsir dalam Konstituante, sebab beliau mempunyai pemahaman terkait Negara Islam.

20

3. *Partai Islam dipentas Nasional 1945-1965, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Buku tersebut ditulis oleh Deliar Noer pada 1987 dan diterbitkan pertama kali oleh Grafiti Pers. Isi buku tersebut membahas terkait keadaan Partai-partai Islam dalam politik di Indonesia. Buku ini mengawali pembahasan terkait umat Islam Indonesia menjelang merdeka, ideologi yang melatarbelakangi lahirnya partai-partai tersebut hingga peran partai-partai Islam dalam masa

---

<sup>19</sup> Ahmad Syafii MA'arif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, 1985, Jakarta: LP3S, hal 8

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 129

Demokrasi terpimpin.<sup>21</sup> Dalam buku ini dibahas secara singkat dan jelas perjalanan dan tujuan diadakannya sidang Konstituante dan peran partai-partai Islam di dalamnya. Namun hanya sedikit sekali pembahasan terait dengan peran M. Natsir dalam sidang tersebut. Pembahasan dalam buku ini bertumpu pada partai-partai Islam, termasuk Natsir didalamnya.

4. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Buku tersebut ditulis oleh Bahtiar Effendy pada tahun 1998 diterbitkan oleh Paramadina merupakan berasal dari disertasi untuk meraih gelar doktor pada Departemen Ilmu Politik, Ohio State University, Amerika Serikat (AS). Buku ini membahas terkait transformasi politik Islam di Indonesia.

Penelitian dalam buku ini lebih mendekati masalah hubungan Islam dan negara dalam kerangka watak Islam sebagai agama yang multiinterpretatif. Selanjutnya fokus perhatian tentang tumbuhnya gelombang baru intelektualisme Islam pada 1980-an, yang benih-benihnya sendiri sudah mulai tumbuh satu dekade sebelumnya. Fokus selanjutnya melihat potensi gerakan itu dalam mengatasi kesalingcurigaan tradisional yang sudah mencemarkan hubungan politik antara Islam dan negara.<sup>22</sup>

Studi yang dilakukan oleh Bahtiar Effendy pertama-tama mendasarkan diri pada penelitian kepustakaan-baik dari sumber primer maupun sekunder. Yang pertama terdiri dari karya-karya yang ditulis oleh para intelektual Muslim dan laporan jurnalistik yang diterbitkan mengenai

---

<sup>21</sup>Deliar Noer, *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Grafiti hal. xx

<sup>22</sup> Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, hal. 5

aktifitas politik dan sosial mereka. Sedangkan sumber-sumber sekundernya mencakup publikasi-publikasi ilmiah, khususnya yang menyangkut tentang hubungan antara Islam dan politik di Indonesia.<sup>23</sup>

Sedangkan penulis dalam melakukan penelitian ini menekankan pada satu tokoh yang terlibat dalam mengusung Islam sebagai falsafah negara Indonesia yaitu Mohammad Natsir pada Majelis Konstituante tahun 1956-1959. Studi ini didasarkan pada penelitian kepustakaan baik sumber primer maupun sekunder. Yang terdiri dari laporan tertulis berupa naskah-naskah, koran, Majalah ataupun karya Mohammad Natsir yang ada hubungannya dengan Majelis Konstituante. Adapun sumber-sumber sekunder mencakup karya-karya penulis lain yang meneliti hubungan Islam dan negara.

5. *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional, Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*. Buku tersebut ditulis oleh Waluyo pada 2009 yang diterbitkan oleh Ombak. Buku ini merupakan tulisan semula diajukan sebagai skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada<sup>24</sup>. Pembahasan dalam buku ini fokus pada pembahasan M. Natsir dari Biografi sampai perjuangan menghadapi tantangan demokrasi. Tulisan tersebut akan menelusuri perjuangannya sesudah kemerdekaan yang dimulai dari peran aktifnya dalam KNIP sampai Menteri Penerangan pada masa revolusi, selain juga kiprahnya sebagai anggota Pengurus Pusat

---

<sup>23</sup> Bahtiar Effendy, 1998, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, hal. 16

<sup>24</sup> Waluyo, 2009, *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional*, Yogyakarta: Ombak. hal. ix

Masyumi, partai politik Islam yang terbentuk sebagai hasil dari Mukhtamar Islam Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 November 1945.<sup>25</sup> Tulisan ini semula diajukan sebagai skripsi di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, pada tahun 1997, empat tahun setelah M. Natsir berpulang kehadapan-Nya. Penyusun buku tersebut sebetulnya tidak ada kedekatan apapun dengan tokoh besar tersebut, namun sebagai anak bangsa yang ingin belajar rasanya merupakan kewajiban untuk mendekati diri dan mengkaji keteladanan tokoh ini serta sedapat mungkin ikut mengangkat ke permukaan pikiran dan idealisme yang sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa ini.<sup>26</sup> Buku ini menelusuri latar belakang kehidupan Natsir sejak lahir di Minangkabau sampai ke tempat perantauannya di Bandung, yaitu periode sebelum proklamasi kemerdekaan sampai pada periode demokrasi liberal antara tahun 1945 sampai akhir tahun 1959.

Buku tersebut memiliki persamaan dengan rencana penelitian penulis yaitu Mohammad Natsir dari perjuangannya tampil sebagai seorang politikus yang terus memasukan pikiran demokrasi dan Islam dalam setiap perjuangannya. Perbedaannya penulis lebih memfokuskan kepada Mohammad Natsir sebagai perwakilan umat Islam dalam memaparkan gagasannya terkait dasar negara dalam Sidang Konstituante 1956-1959.

---

<sup>25</sup> Waluyo, 2009, *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional*, Yogyakarta: Ombak.hal. 7

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. ix

6. *Islam dan Masalah kenegaraan*. Buku ini ditulis oleh Syafii Maarif pada tahun 1987 diterbitkan oleh LP3S. Buku ini mengulas terkait hubungan antara Agama yaitu Islam dengan Negara. Perbedaan penelitian ini dengan buku tersebut dilihat dari judul sudah berbeda dan juga isi dari penelitian penulis lebih dikhususkan pada satu tokoh dengan satu peristiwa.
7. *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*, buku tersebut ditulis oleh M. Dzulfikriddin yang diterbitkan oleh Mizan. Buku ini menjelaskan perjalanan M. Natsir di panggung politik Indonesia dari awal persentuhannya dengan Jong Islamiten Bond, sampai akhir hayatnya. Dzulfikriddin memaparkan biografi lengkap dari awal dia berkecimpung dengan dunia pendidikan hingga menjalani kehidupannya sebagai cendekiawan sekaligus sebagai politikus.<sup>27</sup> Kesimpulan ini bukan tanpa dasar yang tidak jelas, kenyataan memang berkata bahwa Mohammad Natsir memberikan efek positif dalam membangun NKRI.

Secara tersirat Dzulfikriddin ingin mengangkat tokoh cendekiawan Indonesia yang dianggap nama M. Natsir terlalu kecil dalam buku-buku pelajaran sejarah, bahkan sering kali Natsir digambarkan dalam perspektif yang picik dan sempit sehingga dikesankan sebagai tokoh yang penuh dengan predikat buruk: fundamentalis, pemberontak, kaku, dan beberapa gambaran buruk lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Dzulfikriddin, 2010, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, hal.18

<sup>28</sup> M. Dzulfikriddin, 2010, *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, hal 18

Terdapat persamaan antara penulis dengan M. Dzulfikriddin yaitu tokoh dalam buku tersebut yaitu Mohammad Natsir dan politik di Indonesia, yang didalamnya mengupas biografi dan perjuangan yang dihadapi oleh Mohammad Natsir. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis lakukan. Jika Dzulfikriddin menulis buku tersebut dalam Bab 1 membahas profil Mohammad Natsir, Bab II Mohammad Natsir sebagai Birokrat, Bab III Mohammad Natsir sebagai Politikus, Bab IV Menjelaskan pribadi M.Natsir pada usia senja. Jika penulis bertumpu atau berkonsentrasi pada riwayat hidup M. Natsir, perjuangan hingga pergerakan dalam Sidang Konstituante untuk memperkuat argument agar Islam menjadi dasar negara.

8. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer.* Buku tersebut ditulis oleh Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein pada 2010 yang diterbitkan oleh Kencana. Isi buku tersebut mengulas terkait sejarah Islam Klasik sampai masa kontemporer. Pembahasan dalam buku tersebut tidak berdasarkan peristiwa yang terjadi tetapi meliputi pembahasan tokoh-tokoh pemikiran politik dari Islam Abad Klasik dan Pertengahan seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, lalu Islam Abad Modern seperti Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, Mustafa Kemal Ataturk, Ali Abdurraziq sampai Mohammad Natsir dibahas didalamnya, hingga Dinamika Politik Islam Indonesia Kontemporer, dari politik Islam Indonesia Periode Kerajaan Nusantara



sampai Politik Islam era Reformasi.<sup>29</sup> Perbedaan antara buku tersebut dengan penelitian ini adalah penulis hanya meneliti satu peristiwa yang pernah dilakukan oleh Mohammad Natsir yaitu Sidang Konstituante 1956-1959.

9. *Revolusi Indonesia*, buku ini merupakan kumpulan tulisan Mohammad Natsir sepanjang tahun 1951-1955. Tulisan-tulisan tersebut dihimpun dan diterbitkan oleh Segarsy pada tahun 2016. Isi buku ini adalah buah pikir M. Natsir dalam melihat situasi Indonesia dari kacamata politik, dari Revolusi Indonesia, sampai pemahamannya terkait demokrasi.<sup>30</sup> Dalam kaitan penelitian ini penulis mengutip beberapa ucapan M. Natsir terkait Islam dan negara. Perbedaan dengan penelitian ini sangat jelas terlihat bahwa buku tersebut hanya berisikan pola pikir M. Natsir yang direfleksikan berupa tulisan-tulisan yang berbentuk artikel M. Natsir, sedangkan penulis meneliti M. Natsir dari latar belakang hidup sampai peristiwa di dalam Sidang Konstituante.

10. *Islam sebagai Dasar Negara, pikiran-pikiran M. Natsir di sidang Konstituante 1956-1959*, buku ini merupakan buah tangan karya Mohammad Natsir yang disampaikan saat sidang Konstituante berlangsung yang dihimpun dan dicetak oleh Segarsy pada tahun 2014. Disamping sumber-sumber yang lain, buku ini menjadi rujukan penulis terkait pemikiran-pemikiran M. Natsir dalam sidang tersebut. Sebab buku

---

<sup>29</sup> Mohammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, hal. viii

<sup>30</sup> Mohammad Natsir, 2016, *Revolusi Indonesia*, Bandung: Segarsy. hal. 178

inilah kumpulan gagasan M. Natsir dalam mempertahankan argumentnya agar Islam menjadi falsafah dasar negara Indonesia.

11. *Pemikiran Modern Dalam Islam*, ditulis oleh Drs. K.H. Abdul Hamid, M. Ag., dan Drs. Yaya M. Ag serta diterbitkan oleh Pustaka Setia pada tahun 2010. Konten dalam buku ini mengungkapkan secara menyeluruh upaya para tokoh pembaru dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam, baik dalam bidang pendidikan, teologi, sosial maupun politik. Buku tersebut terdapat satu pembahasan yang mengungkapkan tentang konsep Islam dan negara menurut Mohammad Natsir, buku ini memberikan sumbangan pada penelitian penulis khususnya dalam pandangan Mohammad Natsir terhadap negara.

Namun pada dasarnya, buku ini mengungkapkan secara menyeluruh upaya para tokoh pembaru dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam, baik dalam bidang pendidikan, teologi, sosial maupun politik. Sesungguhnya buku ini terlahir karena animo mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sangat tinggi untuk mengetahui secara mendasar latar belakang pemikiran munculnya pembaruan dalam dunia Islam. Hal itu karena ada sebagian kalangan beranggapan bahwa pembaruan membawa “bencana” bagi dunia Islam sebab melahirkan liberalisme, fundamentalisme, bahkan rasionalisme terhadap teks-teks ajaran Islam. Untuk itu, buku ini merupakan penyeimbang dari persoalan-persoalan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Hamid, 2010, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 10

Persamaan dengan penulis buku ini membahas pandangan M. Natsir terhadap Islam dan negara, serta perjuangannya dalam menegakan *Diinullah* sebagai dasar negara. Perbedaan dengan penulis buku ini hanya membahas pemikiran M. Natsir dalam membangun negara dengan dasar Islam, tidak disebutkan pemikiran M. Natsir dalam Sidang Konstituante, sedangkan penulis yang menjadi fokus penelitian penulis adalah keikutsertaan M. Natsir dalam sidang tersebut.

12. *Res Publica, Sekali lagi Res Publica*. Buku ini merupakan kumpulan pidato Soekarno dalam Sidang Konstituante yang diterbitkan oleh Kementrian Penerangan tahun 1959. Buku ini mengulas semua pidato Soekarno dalam Sidang Tersebut dan di dalamnya terdapat singgungan terkait dasar negara. Uraian didalamnya berisikan tentang amanat Presiden kepada sidang pleno Konstituante di Bandung pada 22 April 1959.

13. *Yang Dai Yang Politikus*, penulis buku adalah Dadan Wildan, pada tahun 1997 yang diterbitkan oleh Rosda Karya. Penulis buku ini membahas tokoh-tokoh Persis yang dipilih dengan pertimbangan sederhana, yakni tokoh yang pernah tampil memimpin atau berpengaruh besar terhadap jam'iyah Persis, sejak awal berdirinya (1923) hingga akhir abad ke-20. Para tokoh itu adalah Ahmad Hassan, Mohammad Natsir, K.H. Mohammad Isa Anshary, K.H.E. Abdurrahman, dan K.H. Abdul Katief Muchtar, MA.<sup>32</sup> Persamaan dengan penelitian ini hanya pada pembahasan Mohammad Natsir selebihnya buku tersebut menyebutkan tokoh-tokoh

---

<sup>32</sup> Dadan Wildan, 1997, *Yang Da'i Yang Politikus*., Bandung: Remaja Rosdakarya. hal. v

Persis secara singkat dan padat. Perbedaannya penulis lebih menitikberatkan kepada salah satu tokoh Persis yaitu Mohammad Natsir dalam menyampaikan aspirasi umat Islam ketika sidang Konstituante 1956-1959.

14. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Buku yang disusun oleh Herbert Feith dan Lance Castles diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 1988 diterbitkan ulang pada 1995. Judul asli dari buku ini adalah Indonesian Political Thinking 1945-1965 yang diterbitkan oleh Cornell University Press, Ithaca dan London pada tahun 1970. Sesuai dengan judulnya buku ini mengulas tuntas pemikiran politik dari berbagai tokoh yang mempunyai andil dalam membangun negara Indonesia.

Pemikiran yang berbeda-beda terhadap satu problema melahirkan sebuah perpecahan di Indonesia. Semua orang Indonesia, bagaimanapun penilaiannya atas transisi itu (pen. Orde lama ke Orde Baru), menyadari sekali adanya perbedaan yang tajam antara Orde Baru dan masa sebelumnya. Hal ini mendorong kami untuk mencoba membandingkan pemikiran politik dalam dua periode yang berbeda itu.<sup>33</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika Herbert Feith membahas pemikiran dari kurun waktu 1945-1965 maka penulis membahas pemikiran Mohammad Natsir dalam sidang Konstituante 1956-1959 dan jalannya sidang hingga turunnya dekrit Presiden Soekarno.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

---

<sup>33</sup> Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. LP3ES cet.2 1995, hal. xviii

Pada langkah penelitian, penulis melakukan beberapa tahapan dalam menyusun tugas ini dan menggunakan metode penelitian, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.<sup>34</sup>

## 1. Heuristik

Pada langkah awal dalam merencanakan dan menyusun penelitian yang berjudul “*Peran Mohammad Natsir dalam Mengusung Nila-Nilai Islam pada Sidang Konstituante tahun 1956-1959*”, penulis mencari dan menghimpun sumber penelitian yang ada hubungan dengan penelitian tersebut. Penulis mencari dan menghimpun sumber ke berbagai tempat seperti, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, Bapusipda Jawa Barat, Perpustakaan Daerah Kab. Bandung, Batu Api, Perpustakaan UIN Bandung, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Bandung.

Sumber yang diperoleh penulis terbagi pada dua, yaitu Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Setelah mendapatkan kedua sumber tersebut, penulis membagi pada beberapa bagian yaitu, Sumber Tulis, seperti buku, catatan, koran dan majalah dan Sumber Benda, seperti, foto.

### a. Sumber Primer

#### 1.) Sumber Tertulis

##### (1) Buku

(a) *Capita Selecta*, Jilid I dan II diterbitkan Sumur Bandung pada tahun 1961

---

<sup>34</sup> Dudung Abdurrahman, 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)hal. 56

- (b) *Res Publica ! Sekali Lagi Res Publica!*, amanat Presiden Soekarno Kepada Sidang Pleno Konstituante, Bandung, 22 April 1959 yang diterbitkan oleh Kementrian Penerangan tahun 1959.
- (c) Buku Daftar Hadir Sidang Konstituante, tahun 1956-1959, buku ini penulis dapatkan di Arsip Nasional.
- (d) Buku Draf Susunan Fraksi-Fraksi Partai dalam Sidang Konstituante. Draf ini penulis dapatkan di Arsip Nasional.
- (e) Arsip Sidang Konstituante 1956-1959
- (2) Majalah
- (a) *Madjalah Merdeka*, berita Mingguan untuk Indonesia. th. XI No. 32, 9 Agustus 1958.
- (b) *Daulah Islamiyah*, berita Bulanan tahun 1957
- (c) *Harian Abadi*, Jakarta, 3 Agustus 1952
- (d) *Hikmah*, tanggal 29 Mei 1954
- (e) *Kementrian Penerangan, Res Publica, sekali lagi Res Publica*, 1961
- (f) *Panji Islam*, Juli 1940
- (3) Koran
- (a.) *Indonesia Raya*, *Selasa-Rebo Soal Wilayah dan Bahasa Pembentukan Panitia Istilah disahkan*, 8 September 1957, No. 287, Th. VIII, *Konstituante Akan Ambil Keputusan tentang Dasar Negara*, 6 Oktober 1957, No. 286, Th. VIII, *Sidang*

*Konstituante ke-III tahun 1957 dibuka, 5 November 1957, No. 284, Th. VIII, Perdebatan Sengit Mengenai Dasar Negara di Konstituante, 13 November 1957, No. 295, Th. VIII, Pancasila hanya sesuai bagi negara, sementara. Kamis, 14 November 1957, No. 296, Th. VIII, Negara Demokrasi Berdasarkan Islam, Jumat 15 November 1957*

(b.) *Pikiran Rakyat, Dalam Praktek Sudah Federal tanpa lalui UUD, Suwirjo ajukan Kompromi, 23 November 1957, Dasar-dasar Negara di Konstituante, 13 November 1957, No. 138, Th. XII, Bukan Membuat Undang-Undang Negara yang Baru, 12 November 1957, No. 611, Th. XII, Menyambut terbentuknya Majelis Konstituante, 21 November 1956, No.180, Th. 27, Sidang Konstituante dibuka, 12 November 1956, No. 154, Th. XI, Presiden telah mensahkan Ketua-ketua Konstituante, 24 November 1956, Dalam Praktek Sudah Federal tanpa lalui UUD, Suwirjo ajukan Kompromi, 23 November 1957, No. 151, Th. XII, Ke Kompromi Mengenai Materi Konstitusi Dasar-dasar Negara di Lanjutkan, Perlunya Toleransi dari Fraksi-fraksi 27 November 1957, No. 189, Th. XII, Konstituante memulai sidang ke-I tahun 1958, 13 Januari 1958, No. 190, Th. XII, Konstituante Dibuka Secara agak Unik, 14 Januari 1958, No. 203, Th. XII, Bentuk “Republik”, Republik “Apa” tunggu dulu, 29 Januari 1958, No. 202, Th.*

XII, *Rapat Pleno “macet” Untuk Tentukan Bentuk Pemerintahan*, 28 Januari 1958, No. 204, Th. XII, *Hak Azasi Manusia ada tujuh Macam Pendapat*, 30 Januari 1958

(c.) *Suluh Indonesia, Konstituante dilantik*, terbitan 10 November 1956, *Blok Islam dalam Konstituante berikrar*, 29 November 1956, *6 Pasal Lolos dari Konstituante*, 1 Februari 1957, *Konstitusi dengarkan Laporan Panitia Pelapor*, Jum’at 15 Februari 1957, *Konstituante Mulai Masa Sidang ke-III*, Selasa, 10 November 1957, *Surat tentang acara sidang pleno 3 tahun 1957, dokumen sidang konstituante 1957*

(d.) *Warta Berita, Konstituante*, 5 Desember 1957, No. 22, Th. 58, *Konstituante, Telah diambil Putusan Tentang Bentuk Pemerintah*, 29 Januari 1958 *Suluh Indonesia*, terbitan Sabtu 10 November 1956

b. Sumber Sekunder

1) Sumber Tertulis

(1) Buku

(a) *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Buku tersebut ditulis oleh Adnan Buyung Nasution yang ditulis pada 1992.

(b) *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Buku tersebut ditulis oleh Bahtiar Effendy pada tahun 1998 diterbitkan oleh Paramadina.



- (c) *Islam dan Masalah kenegaraan*. Buku ini ditulis oleh Syafii Maarif pada tahun 1987 diterbitkan oleh LP3S.
- (d) *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional, Mohammad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*. Buku tersebut ditulis oleh Waluyo pada 2009 diterbitkan oleh Ombak.
- (e) *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia*, buku tersebut ditulis oleh M. Dzulfikriddin yang diterbitkan oleh Mizan.
- (f) *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, buku ini merupakan disertasi yang ditulis oleh Ahmad Syafii Ma'arif yang diterbitkan pertama kali pada Februari 1985 oleh LP3S Indonesia.
- (g) *Partai Islam dipentas Nasional 1945-1965, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Buku tersebut ditulis oleh Deliar Noer pada 1987 dan diterbitkan pertama kali oleh Grafiti Pers.
- (h) *Revolusi Indonesia*, buku ini merupakan kumpulan tulisan Mohammad Natsir sepanjang tahun 1951-1955. Tulisan-tulisan tersebut dihimpun dan diterbitkan oleh Sega Arsy pada tahun 2016.
- (i) *Islam sebagai Dasar Negara, pikiran-pikiran M. Natsir di sidang Konstituante 1956-1959*, buku ini merupakan buah tangan karya Mohammad Natsir yang disampaikan saat sidang

Konstituante berlangsung yang dihimpun dan dicetak oleh Sega Arsy pada tahun 2014.

(j) *100 tahun Mohammad Natsir*, buku tersebut ditulis oleh republika dan diterbitkan oleh Republika, tt.vv

(k) *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Buku tersebut ditulis oleh Muhammad Iqbal dan H. Amin Husein pada 2010 yang diterbitkan oleh Kencana.

(1) Majalah

(a) Sabili, Edisi Khusus 100 tahun Mohammad Natsir. Majalah ini terbit pada tahun 2008.

(b) Tempo, Pergolakan Demokrasi Liberal 1950-1959: zaman emas atau hitam pada tahun 2007.

(c) Memoar, Tempo, 2 Desember 1989

(d) Panji Masyarakat, Nomor 691, 1-10 Agustus 1991

2. Kritik

Setelah sumber didapatkan oleh penulis, tahapan selanjutnya adalah mengkritik. Pada tahapan kritik, penulis membagi pada dua bagian, kritik ekstern dan intern.

- a. *Pertama*, tahapan ekstern ini, penulis mengkritik terhadap sumber yang didapatkan, bahwa sumber primer diatas merupakan sumber yang sejaman dengan tokoh dan peristiwa yang diajukan sebagai rencana penelitian. Sebab dilihat dari tanggal terbit dan penulis, merupakan orang-orang yang hidup pada masa itu, serta merupakan hasil dari

pemikiran-pemikiran pada peristiwa tersebut yang dituangkan dalam sebuah buku.

#### 1. Sumber Dokumen

##### 1) Draf Susunan Fraksi-Fraksi Partai dalam Sidang Konstituante.

Draf ini penulis dapatkan di Arsip Nasional. Tulisan yang dipakai masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan seperti saya menjadi saja. Draf ini diterbitkan oleh panitia konstituante dengan tahun 1956-1959 dengan kertas kuning emas. Bila dilihat dari sudut ini draf ini merupakan sumber otentik.

##### 2) Arsip Sidang Konstituante 1956-1959. Arsip ini memakai

tulisan ejaan yang belum disempurnakan dengan menggunakan kertas berwarna kuning emas. Tulisannya pun menggunakan hasil dari ketikan dari mesin ketik belum menggunakan print atau komputer untuk menulisnya. Bila dilihat dari sudut tersebut merupakan sumber otentik.

#### 2. Sumber Buku

##### 1) *Capita Selecta*, Jilid I dan II diterbitkan Sumur Bandung pada

tahun 1961. Buku karangan M. Natsir memakai tulisan yang belum disempurnakan. Buku tersebut mempunyai kertas kuning emas, serta penulis merupakan tokoh yang ikut dalam sidang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sumber tersebut adalah sumber otentik.

2) *Res Publica ! Sekali Lagi Res Publica!*, amanat Presiden Soekarno Kepada Sidang Pleno Konstituante, Bandung, 22 April 1959 yang diterbitkan oleh Kementrian Penerangan tahun 1959. Penerbit merupakan instansi pemerintah yang menerangkan ucapan Presiden dalam sidang tersebut. terbitannyapun tahun 1961 dan penulisnya merupakan orang yang mengikuti peristiwa tersebut. Maka sumber ini merupakan sumber otentik.

3) Buku Daftar Hadir Sidang Konstituante, tahun 1956-1959, buku ini penulis dapatkan di Arsip Nasional. Tabel yang digunakan masih manual dengan penggaris dan memakai tulisan dengan ejaan yang belum disempurnakan. Maka ini merupakan sumber otentik.

### 3. Sumber Majalah dan Koran

1) *Madjalah Merdeka*, berita Mingguan untuk Indonesia. th. XI No. 32, 9 Agustus 1958. Majalah ini menggunakan tulisan dengan ejaan yang belum disempurnakan serta diterbitkan pada tahun 1958 yang merupakan berbarengan dengan proses sidang konstituante. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

2) *Daulah Islamiyyah*, berita Bulanan tahun 1957. Majalah ini menggunakan tulisan dengan ejaan yang belum disempurnakan serta diterbitkan pada tahun 1957 yang merupakan berbarengan

dengan proses sidang konstituante. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

3) *Harian Abadi*, Jakarta, 3 Agustus 1952. Majalah ini menggunakan tulisan dengan ejaan yang belum disempurnakan serta diterbitkan pada tahun 1952 dengan kertas berwarna kuning emas. Diterbitkan pada 1952 sebelum sidang itu berlangsung. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

4) *Hikmah*, tanggal 29 Mei 1954. Majalah ini menggunakan tulisan dengan ejaan yang belum disempurnakan serta diterbitkan pada tahun 1954 dengan kertas berwarna kuning emas. Diterbitkan pada 1954 sebelum sidang itu berlangsung. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

5) *Panji Islam*, Juli 1940. Majalah ini menggunakan tulisan dengan ejaan yang belum disempurnakan serta diterbitkan pada tahun 1940 dengan kertas berwarna kuning emas. Diterbitkan pada 1940 sebelum sidang itu berlangsung. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

6) *Indonesia Raya*, *Selasa-Rebo Soal Wilayah dan Bahasa Pembentukan Panitia Istilah disahkan*, 8 September 1957, No. 287, Th. VIII, *Konstituante Akan Ambil Keputusan tentang Dasar Negara*, 6 Oktober 1957, No. 286, Th. VIII, *Sidang Konstituante ke-III tahun 1957 dibuka*, 5 November 1957, No.

284, Th. VIII, *Perdebatan Sengit Mengenai Dasar Negara di Konstituante*, 13 November 1957, No. 295, Th. VIII, *Pancasila hanya sesuai bagi negara, sementara*. Kamis, 14 November 1957, No. 296, Th. VIII, *Negara Demokrasi Berdasarkan Islam*, Jumat 15 November 1957. Koran ini menggunakan ejaan yang belum disempurnakan dan terbit pada kurun waktu 1956-1959 yang merupakan terjadinya proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

- 7) Pikiran Rakyat, *Dalam Praktek Sudah Federal tanpa lalui UUD, Suwirjo ajukan Kompromi*, 23 November 1957, *Dasar-dasar Negara di Konstituante*, 13 November 1957, No. 138, Th. XII, *Bukan Membuat Undang-Undang Negara yang Baru*, 12 November 1957, No. 611, Th. XII, *Menyambut terbentuknya Majelis Konstituante*, 21 November 1956, No.180, Th. 27, *Sidang Konstituante dibuka*, 12 November 1956, No. 154, Th. XI, *Presiden telah mensahkan Ketua-ketua Konstituante*, 24 November 1956, *Dalam Praktek Sudah Federal tanpa lalui UUD, Suwirjo ajukan Kompromi*, 23 November 1957, No. 151, Th. XII, *Ke Kompromi Mengenai Materi Konstitusi Dasar-dasar Negara di Lanjutkan, Perlunya Toleransi dari Fraksi-fraksi* 27 November 1957, No. 189, Th. XII, *Konstituante memulai sidang ke-I tahun 1958*, 13 Januari 1958, No. 190, Th. XII, *Konstituante Dibuka Secara agak*

*Unik*, 14 Januari 1958, No. 203, Th. XII, *Bentuk “Republik”*,  
*Republik “Apa” tunggu dulu*, 29 Januari 1958, No. 202, Th.  
XII, *Rapat Pleno “macet” Untuk Tentukan Bentuk*  
*Pemerintahan*, 28 Januari 1958, No. 204, Th. XII, *Hak Azasi*  
*Manusia ada tujuh Macam Pendapat*, 30 Januari 1958. Koran  
ini menggunakan ejaan yang belum disempurnakan dan terbit  
pada kurun waktu 1956-1959 yang merupakan terjadinya  
proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

8) *Suluh Indonesia*, *Konstituante dilantik*, terbitan 10 November  
1956, *Blok Islam dalam Konstituante berikrar*, 29 November  
1956, *6 Pasal Lolos dari Konstituante*, 1 Februari 1957,  
*Konstitusi dengarkan Laporan Panitia Pelapor*, Jum’at 15  
Februari 1957, *Konstituante Mulai Masa Sidang ke-III*, Selasa,  
10 November 1957, *Surat tentang acara sidang pleno 3 tahun*  
1957, *dokumen sidang konstituante 1957*. Koran ini  
menggunakan ejaan yang belum disempurnakan dan terbit pada  
kurun waktu 1956-1959 yang merupakan terjadinya proses  
sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

9) *Warta Berita*, *Konstituante*, 5 Desember 1957, No. 22, Th. 58,  
*Konstituante, Telah diambil Putusan Tentang Bentuk*  
*Pemerintah*, 29 Januari 1958, Koran ini menggunakan ejaan  
yang belum disempurnakan dan terbit pada kurun waktu 1956-

1959 yang merupakan terjadinya proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

- b. *Kedua*, kritik intern, penulis mencoba mengkaji isi dari sumber-sumber tersebut dengan arsip-arsip yang ada baik dari Perpustakaan Nasional atau Arsip Nasional. Hasilnya adalah semua isi yang terkandung dalam buku-buku atau sumber arsip tersebut relevan dengan tokoh dan peristiwa yang dimaksud. Walaupun dalam penulisannya terdapat subjektivitas. Sehingga setelah mengetahui sumber-sumber yang telah dikritik akan muncul kredibilitas informasi sebelum digunakan.

#### 1. Sumber Dokumen

- 1) Draf Susunan Fraksi-Fraksi Partai dalam Sidang Konstituante. Draf ini penulis dapatkan di Arsip Nasional. Draf ini berisi tentang keputusan dari tiap fraksi terhadap persoalan yang dihadapi dalam sidang Konstituante 1956-1959. Bila dilihat dari sudut ini draf ini merupakan sumber otentik.
- 2) Arsip Sidang Konstituante 1956-1959. Arsip ini merupakan proses perjalanan sidang Konstituante yang dirunut berdasarkan waktu sidang. Draf ini meliputi tokoh yang ikut dalam sidang, sampai pada keputusan dari sidang tersebut. Bila dilihat dari sudut tersebut merupakan sumber otentik.

#### 2. Sumber Buku

- 1) *Capita Selecta*, Jilid I dan II diterbitkan Sumur Bandung pada tahun 1961. Buku karangan M. Natsir Tulisan merupakan



karangan Natsir yang mempunyai hubungan dengan keadaan politik pada kurun waktu 1940-1960. Hal ini menunjukkan bahwa sumber tersebut adalah sumber otentik.

3) *Res Publica ! Sekali Lagi Res Publica!*, amanat Presiden Soekarno Kepada Sidang Pleno Konstituante, Bandung, 22 April 1959 yang diterbitkan oleh Kementrian Penerangan tahun 1959. Buku ini merupakan pidato amanat yang diberikan Soekarno kepada Majelis Konstituante agar kembali pada UUD 1945. Maka sumber ini merupakan sumber otentik.

3) Buku Daftar Hadir Sidang Konstituante, tahun 1956-1959, buku ini penulis dapatkan di Arsip Nasional. Berisikan anggota yang hadir pada sidang konstituante. Maka ini merupakan sumber otentik.

#### 1. Sumber Majalah dan Koran

1) *Madjalah Merdeka*, berita Mingguan untuk Indonesia. th. XI No. 32, 9 Agustus 1958. Majalah ini membahas tentang peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1958 khususnya pemberitaan dalam sidang Konstituante. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

2) *Daulah Islamiyah*, berita Bulanan tahun 1957. Majalah ini membahas tentang peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1957 khususnya pemberitaan dalam sidang Konstituante. Pada

waktu sidang tentang dasar negara. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.

- 3) *Harian Abadi*, Jakarta, 3 Agustus 1952. Majalah ini membahas tentang peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1952 khususnya pemberitaan dalam sidang Konstituante. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.
- 4) *Hikmah*, tanggal 29 Mei 1954. Majalah ini membahas tentang peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1958 khususnya pemberitaan dalam sidang Konstituante. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.
- 5) *Panji Islam*, Juli 1940 Majalah ini membahas tentang peristiwa politik yang terjadi pada tahun 1958 khususnya pemberitaan dalam sidang Konstituante. Ini merupakan majalah yang menjadi sumber otentik.
- 6) *Indonesia Raya*, Selasa-Rebo Soal Wilayah dan Bahasa Pembentukan Panitia Istilah disahkan, 8 September 1957, No. 287, Th. VIII, Konstituante Akan Ambil Keputusan tentang Dasar Negara, 6 Oktober 1957, No. 286, Th. VIII, Sidang Konstituante ke-III tahun 1957 dibuka, 5 November 1957, No. 284, Th. VIII, Perdebatan Sengit Mengenai Dasar Negara di Konstituante, 13 November 1957, No. 295, Th. VIII, Pancasila hanya sesuai bagi negara, sementara. Kamis, 14 November 1957, No. 296, Th. VIII, Negara Demokrasi

*Berdasarkan Islam*, Jumat 15 November 1957. Semua isi dari koran tersebut menjelaskan kronologi sidang konstituante dengan terbitan tanggal dan tahun peristiwa itu terjadi pada kurun waktu 1956-1959 yang merupakan terjadinya proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

- 7) *Pikiran Rakyat*, *Dalam Praktek Sudah Federal tanpa lalui UUD*, *Suwirjo ajukan Kompromi*, 23 November 1957, *Dasar-dasar Negara di Konstituante*, 13 November 1957, No. 138, Th. XII, *Bukan Membuat Undang-Undang Negara yang Baru*, 12 November 1957, No. 611, Th. XII, *Menyambut terbentuknya Majelis Konstituante*, 21 November 1956, No.180, Th. 27, *Sidang Konstituante dibuka*, 12 November 1956, No. 154, Th. XI, *Presiden telah mensahkan Ketua-ketua Konstituante*, 24 November 1956, *Dalam Praktek Sudah Federal tanpa lalui UUD*, *Suwirjo ajukan Kompromi*, 23 November 1957, No. 151, Th. XII, *Ke Kompromi Mengenai Materi Konstitusi Dasar-dasar Negara di Lanjutkan*, *Perlunya Toleransi dari Fraksi-fraksi* 27 November 1957, No. 189, Th. XII, *Konstituante memulai sidang ke-I tahun 1958*, 13 Januari 1958, No. 190, Th. XII, *Konstituante Dibuka Secara agak Unik*, 14 Januari 1958, No. 203, Th. XII, *Bentuk "Republik"*, *Republik "Apa" tunggu dulu*, 29 Januari 1958, No. 202, Th. XII, *Rapat Pleno "macet" Untuk Tentukan Bentuk*

*Pemerintahan*, 28 Januari 1958, No. 204, Th. XII, *Hak Azasi Manusia ada tujuh Macam Pendapat*, 30 Januari 1958. Semua isi dari koran tersebut menjelaskan kronologi sidang konstituante dengan terbitan tanggal dan tahun peristiwa itu terjadi pada kurun waktu 1956-1959 yang merupakan terjadinya proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

8) *Suluh Indonesia*, *Konstituante dilantik*, terbitan 10 November 1956, *Blok Islam dalam Konstituante berikrar*, 29 November 1956, *6 Pasal Lolos dari Konstituante*, 1 Februari 1957, *Konstitusi dengarkan Laporan Panitia Pelapor*, Jum'at 15 Februari 1957, *Konstituante Mulai Masa Sidang ke-III*, Selasa, 10 November 1957, *Surat tentang acara sidang pleno 3 tahun 1957, dokumen sidang konstituante 1957*. Semua isi dari koran tersebut menjelaskan kronologi sidang konstituante dengan terbitan tanggal dan tahun peristiwa itu terjadi pada kurun waktu 1956-1959 yang merupakan terjadinya proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

9) *Warta Berita*, *Konstituante*, 5 Desember 1957, No. 22, Th. 58, *Konstituante, Telah diambil Putusan Tentang Bentuk Pemerintah*, 29 Januari 1958, Semua isi dari koran tersebut menjelaskan kronologi sidang konstituante dengan terbitan tanggal dan tahun peristiwa itu terjadi pada kurun waktu 1956-

1959 yang merupakan terjadinya proses sidang tersebut. ini merupakan sumber otentik.

### 3. Interpretasi

Proses penafsiran terhadap data-data yang telah diseleksi atau dilakukan kritik sumber. Proses Interpretasi inilah sejarawan dituntut untuk mampu menafsirkan makna-makna, atau kejadian-kejadian yang pada mulanya masih terkubur menjadi suatu rangkaian cerita sejarah yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan, namun keduanya anara analisis dan sintesis dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi.<sup>35</sup>

Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menafsirkan fakta-fakta yang ada dari berbagai sumber yang dipandang relevan dengan peristiwa tersebut sehingga tidak keluar dari pembahasan dan tidak menjadi bias kearah yang lain. Maka dalam pandangan ini, Mohammad Natsir merupakan salah satu kader pembaharu yang telah disiapkan oleh para ulama dengan mempelajari Islam di Sumatera yang dikala itu disebut sebagai pulau yang pertama kali pembaharuan Islam di Minangkabau. Di Bandung, minat Natsir terhadap agama semakin berkembang. Natsir bersama Ahmad Hasan mendirikan sebuah majalah dengan nama Pembela Islam, Natsir menghimpun kader-kader Islam untuk melawan pemahaman yang dianut oleh Soekarno dan pendukungnya mayoritas

---

<sup>35</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2005), hal. 100

dari kalangan nasionalis dan komunis. Semenjak adanya Natsir majalah tersebut merupakan majalah yang paling laris dicari oleh masyarakat.

Ahmad Hassan sebagai guru dari Natsir memberikan pemahaman agama yang modern dan melawan pemahaman tradisional yang dianggap jauh dari dasar pemahaman agama baik itu ibadah maupun mu'amalah. Didikan yang diberikan oleh Ahmad Hassan merupakan benih emas yang akan memberi warna baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Hasilnya Natsir mampu tampil diberbagai sektor penting pemerintahan, seperti Menteri Penerangan dan Perdana Menteri.

Pergolakan yang terjadi diberbagai daerah tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh Natsir sebagai Perdana Menteri sehingga perannya digantikan. Setelah itu Natsir konsisten dengan partainya yaitu Masyumi dengan terpilihnya sebagai anggota sidang Majelis Konstituante. Mohammad Natsir mempunyai peran sebagai anggota sidang Konstituante. Konstituante adalah sebuah wadah perwakilan rakyat yang dibentuk untuk menyusun Undang-undang Dasar yang baru. Sidang Konstituante berlangsung tujuh kali sidang pada 1956 sampai 1959. Natsir merupakan anggota dari Majelis Konstituante yang dipilih pada 1955 dari partai Masyumi. Natsir tidak berjalan sendirian, Natsir yang memotori fraksi Islam untuk berkoalisi agar cita-cita Islam dapat tercapai.

Mohammad Natsir turun yang sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI dari golongan yang menginginkan terbentuknya sebuah negara dengan dasar kebebasan (plural) dan sekuler dengan mengemukakan ide dan gagasannya

untuk menghantam gagasan yang bebas, khususnya dalam sidang tersebut menyampaikan aspirasi umat Islam agar Islam dijadikan sebagai pedoman negara atau menjadi Dasar Negara. Namun semua itu musnah karena sidang tidak bisa berjalan dengan semestinya akibat turun tangan pemerintah yang mengusulkan kembali pada UUD 1945 yang mempunyai jiwa dan pribadi masyarakat Indonesia. Sehingga ide-ide tersebut tidak diamini oleh Presiden Soekarno. Maka Soekarno memutuskan untuk kembali menjadikan UUD 45 sebagai dasar negara pada 5 Juli 1959 dengan turunnya dekrit Presiden dan membubarkan Majelis Konstituante.

#### 4. Historiografi

Setelah melakukan heuristik, kritik dan interpretasi terhadap fakta-fakta yang didapatkan dari sumber-sumber tersebut, selanjutnya penulis melakukan historiografi atau penulisan kembali sejarah terhadap peran Mohammad Natsir dalam sidang Konstituante dalam rangka mengungkap keberadaan tokoh tersebut dan dituangkan dalam sebuah tulisan karya sendiri.

Adapun sistematika penulisan dari rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan, dalam bab ini membahas latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, langkah-langkah penelitian, outline, daftar sumber, dan lampiran.

BAB II : Riwayat Hidup Mohammad Natsir, bab ini membahas tentang biografi Mohammad Natsir, Perjuangan Mohammad Natsir dalam Bidang Politik dan Keagamaan, dan Karya-karyanya.

BAB III : Pemilihan Umum 1955, Transkrip Pidato Mohammad Natsir, Proses Sidang Konstituante 1956-1959, Peran Mohammad Natsir dalam Sidang Konstituante 1956-1959, Kegagalan Natsir dalam Konflik Ideologi pada Majelis Konstituante.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini dibahas kesimpulan, Kritik dan Saran terkait penelitian yang akan dikaji.

